

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Politikus vs Selebritis

Mahi M Hikmat

Doktor Komunikasi Politik Unpad
Dosen UIN SGD Bandung
Dewan Pakar ICMI Jabar



JIKA benar hasil survei dijadikan rujukan terpenting bagi pertimbangan partai politik (parpol) dalam menentukan bakal calon (balon) Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, itu menunjukkan perubahan besar. Hal itu pula sekaligus menepis tuduhan telah berkembangbiaknya "oligarki" parpol di republik ini. Selama ini telah berkembang tuduhan tajam dari berbagai pihak bahwa parpol di Indonesia telah terjebak pada kubangan "deparpolisasi" dan "oligarki".

Nuansa "deparpolisasi" telah berkembang biak dengan kecenderungan menguatnya diskoneksi antara partisipasi politik warga negara dengan sepak terjang sebagian parpol. Ketika pemilu berlangsung, rakyat di rayu-rayu untuk memilih calon dari parpolnya, tetapi ketika mereka sudah duduk di kursi legislatif, tak jarang kebijakan mereka jauh dari harapan rakyat. Mereka mengaku wakil rakyat, tetapi sikap dan perilakunya lebih dominan memperjuangkan kepentingan parpol ketimbang nasib rakyat. Bahkan, tidak sedikit juga perilaku mereka bertolak belakang dan mengkhianati nurani rakyat.

Nuansa "oligarki" parpol pun dimainkan sebagian parpol dengan kokohnya cengkaman kuku elite pusat. Tidak sedikit parpol yang masih mengagungkan strategi dinasti se-

hingga menumpulkan kaderisasi. Parpol menjadi singgasana berkumpulnya sanak famili. Keluarga lebih didahulukan ketimbang kader potensial. Bahkan, pendiktean terhadap pengurus parpol di tingkat lokal pun tak jarang terjadi, mulai dari penentuan pengurus, penentuan calon legislatif, bahkan penentuan calon kepala daerah, semua ditentukan pada kebijakan sentralistik elite pusat.

Kendati realitas tersebut masih tergambar dalam fakta-fakta politik, termasuk pada penentuan calon kepala daerah, tetapi di Jawa Barat perlahan berkembang nuansa demokratisasi. Restu elite parpol pusat memang masih menjadi rujukan, tetapi pertimbangan mereka sudah bergeser pada perilaku pemilih. Survei adalah salah satu upaya untuk memotret kehendak pemilih alih-alih kehendak rakyat.

Menentukan balon Gubernur-Wakil Gubernur yang akan maju pada Pilkada Jabar, 2013 memang bukan pekerjaan mudah sehingga wajar jika parpol pun ekstra hati-hati dan menerapkan berbagai strategi. Dalam Pilkada DKI Jakarta, calon boleh "imporan" dan dapat memenangkan pertarungan, tetapi Jabar

bukan DKI. Di Jabar, nuansa primordialisme masih kental; putra daerah (Sunda dan bukan Sunda) masih memiliki daya tawar yang kuat karena Jabar tidak se-multietnis DKI.

Meyakinkan pemilih Jabar yang jumlahnya besar, sekitar 39 jutaan, tidak dapat hanya mengandalkan isu-isu fenomenal melalui media massa karena jangkauan media massa pun sangat terbatas, hanya menguasai sekitar 20-50% pemilih. Oleh karena itu, figur orang-orang yang memiliki popularitas "panjang", seperti artis-artis masa lalu yang hingga kini masih mengganggu merupakan pilihan yang memungkinkan.

”
*Bagaimana bisa, parpol
bermanajemen dinasti,
sentralistik, dan "oligarkis"
harus mengelola negara
dalam manajemen demokrasi.*

Hal itu di antaranya dibuktikan melalui survei yang objektif. Oleh karena itu, Pilkada Jabar akan menjadi ajang pertarungan sengit pasangan koalisi politikus dan selebritis.

Parpol memang tidak dapat berleha-leha melewatkan tahapan penentuan balon Pilkada Jabar. Selain tahapan ini bagian penting untuk memenangkan pertarungan, juga kemenangan di Jabar merupakan start positif untuk pemilu legislatif dan pilpres 2014. Jabar adalah lum-

bung suara yang menguasai seperlima jumlah pemilih nasional. Kemenangan di DKI belum sukses jika tidak dilengkapi dengan kemenangan di Jabar. Oleh karena itu, parpol dan para kadernya harus sungguh-sungguh menyambut gendrang "perang" perebutan singgasana Gedung Sate ini.

Metode survei memang salah satu yang dapat dijadikan parameter bagi parpol untuk menentukan balon, terutama terkait dengan tingkat popularitas. Strategi memasang figur anutan rakyat yang populer untuk memenangkan pertarungan memang belum usang. Bahkan, realitas itu menggeser figur po-

litisi oleh selebritis. Fakta politik seperti itu seharusnya sudah dapat dibaca jauh-jauh hari oleh parpol. Plato, Aristoteles, sampai ke Al-Farabi sudah mengingatkan, ketika gendrang pemilihan langsung melibatkan seluruh rakyat ditabuh, parpol harus menggeser figur tidak hanya sisi kualitas, apalagi dari sisi kader atau senioritas, tetapi juga popularitas dan elektabilitas.

Penentuan balon dengan pertimbangan hasil survei pun menunjukkan telah bergesernya "oligarki" parpol pada semangat demokrasi. Kendati masih berbumbu pragmatisme, tetapi merupakan secercah harapan bahwa esok-lusa visi parpol di negeri ini akan lebih baik. Prinsip-prinsip demokrasi yang dijadikan pilar penyelenggaraan negara ini memang sejatinya menjadi prinsip-prinsip parpol. Parpol adalah miniatur sebuah negara. Manajemen demokrasi

dalam sebuah negara selayaknya diujicobakan dalam manajemen parpol. Hanya parpol yang sudah memainkan manajemen demokrasi yang baiklah yang layak dan berhak diberikan kesempatan untuk menerapkannya dalam manajemen penyelenggaraan negara.

Bagaimana bisa, parpol ber-manajemen dinasti, sentralistik, dan "oligarkis" harus mengelola negara dalam manajemen demokrasi. Inilah yang makin menguatkan pendapat Schugurensky (2004) bahwa kehadiran parpol bisa saja dapat menyebabkan terjadinya defisit demokrasi. Demokrasi yang sejatinya dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap kesertaan warga negara, dipertahalkan dalam kepentingan kepartaian yang dominan. ***